**KAJIAN DAMPAK PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR**
*(Study on the impact of changes in the forest function to
the community around the forest)*

Oleh :
Sylviani¹⁾

ABSTRACT:

Changes in the forest function is an agent change the function of that forest to the other function. The judicial cases in the implementation of the change refers to the article 19 paragraph (1) of law No. 41 of 1999 on forestry, namely "Changes in designation and the function of forest area are set by the government based on the result of integrated research". The mechanism that regulated the changes is based on activity of Forestry Decree No. 70/Kpts-15/2000. The change in the function of forest is intended to optimize the utilization of forest sustainability for welfare of the society. Therefore, the orientation of change is more on the aspect of forest utilization. Based on data from agency of Forest Planning changes in forest production function to other forest function as a whole until January 2007 cover about 884860.36 ha spread across Indonesia. This research is intended to study the impact of changes of the function of Production Forest (HP) and Protection Forest (HL) to the area conservation forest namely National Park (TN). Research was conducted in 3 Provinces i.e North Sumatera Batang Gadis National Park (TNBG), Bukit Duabelas National Park (TNBD) in Jambi and The Sebangau National Park (TNS) in Central Kalimantan. This Study used qualitative descriptive approach on social, economic and environment and legal aspects.

The results showed that the changes of production forest function mostly took place in the area of abandoned concession. The communities around the production forest were not directly affected because their livelihood in the former concession were not one permanent.

In contrast, the community living around protected forest were affected because most farmers that lived around the forest occupied part of the protected forest for their livelihood. The impact was different in TNBG only $\pm 10\%$ from 20 respondent felt affected as they were prohibited from hunting, especially in the protected area, while community in TNBD was prohibited to cut the trees and in TNS was prohibited from farming.

Key words : forest function change, community, production forest, national park

¹⁾ Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor, jalan Gunung Batu No. 5 Bogor, Jawa Barat

ABSTRAK

Perubahan fungsi kawasan hutan merupakan kegiatan merubah fungsi suatu kawasan hutan menjadi fungsi lainnya. Realisasi perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan konservasi atau hutan lindung dilakukan untuk menghentikan kegiatan eksploitasi pemanfaatan hasil hutan kayu dalam upaya menjaga kelestarian keaneka ragaman hayati, perlindungan plasma nutfah dan mempertahankan aset lainnya yang ada di kawasan hutan produksi. Landasan yuridis dalam pelaksanaan kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada pasal 19 ayat (1) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu” Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Mekanisme yang mengatur perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan atas Keputusan Menteri Kehutanan No 70/KPTS-II/2000. Pelaksanaan perubahan fungsi kawasan hutan ditujukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan fungsi hutan secara lestari dan berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian orientasi perubahan fungsi kawasan hutan lebih pada aspek pemanfaatan hutan. Berdasarkan data Badan Planologi Departemen Kehutanan perkembangan perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan hutan lainnya secara keseluruhan sampai dengan Januari 2007 seluas 884.860,36 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini mengkaji dampak perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) menjadi kawasan hutan dengan fungsi konservasi yaitu sebagai Taman Nasional (TN). Penelitian dilakukan pada 3 propinsi untuk Sumatera Utara dengan lokasi di Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), untuk Jambi di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan untuk Kalimantan Tengah di Taman Nasional Sebangau (TNS). Metode penelitian dilakukan secara diskriptif kualitatif ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa kawasan hutan produksi yang mengalami perubahan merupakan kawasan HPH yang sudah tidak aktif atau ijinnya sudah dicabut. Sehingga dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat sekitar hutan produksi tidak berpengaruh secara langsung karena sebagian masyarakat sekitar kawasan yang bekerja pada perusahaan kayu bukan merupakan sumber mata pencaharian tetap. Berbeda dengan masyarakat yang bermukim sekitar kawasan hutan lindung dampak secara hukumnya terlihat setelah dilakukan tata batas, karena sebagian besar petani mempunyai lahan garapan di sekitar dan di dalam kawasan hutan lindung baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap dengan rata-rata luas garapan 0,25 ha. Pada masing-masing lokasi dampak sosial ekonomi masyarakat berbeda-beda seperti di TNBG hanya $\pm 10\%$ dari 20 responden masyarakat yang merasakan dampak dari perubahan fungsi kawasan yaitu masyarakat tidak bisa berburu terutama di kawasan lindung, di TNBD masyarakat tidak bisa membalok dan di TNS masyarakat tidak bisa berkebun. Sedangkan dampak terhadap lingkungan adanya penebangan liar, perambahan hutan dan penambangan liar.

Kata kunci: perubahan fungsi hutan, masyarakat, hutan produksi, taman nasional

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk terwujudnya optimalisasi dan manfaat fungsi kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan. Prosedur dan mekanismenya dilakukan secara bertahap dimana sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terutama terhadap masyarakat yang berada di sekitar atau di dalam kawasan yang akan mengalami perubahan. Perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya. Departemen Kehutanan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dan menekan laju eksploitasi hutan dengan menerapkan moratorium konversi hutan alam. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/KPTS-II/2001 tentang penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penetapan kawasan hutan, perubahan status kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai fungsi konservasi keberadaan dan kondisi hutan mempengaruhi terhadap pengawetan keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya. Dengan fungsi lindung hutan berperan dalam perlindungan dan penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai fungsi produksi hutan merupakan penyedia hasil hutan yang dapat dimanfaatkan baik oleh masyarakat sekitar maupun kalangan tertentu, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berhak. Kawasan hutan juga memiliki nilai politis terkait dengan penguasaan dan atau pemilikan kawasan. Penetapan suatu kawasan hutan dalam fungsinya yang spesifik, baik itu untuk fungsi konservasi, lindung maupun produksi, memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Khusus di kawasan hutan dengan fungsi produksi, keterlibatan manusia di dalamnya jauh lebih intensif dibandingkan dengan kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi. Perubahan fungsi kawasan hutan dari yang sebelumnya memiliki fungsi produksi menjadi kawasan hutan dengan fungsi lain akan berdampak pada hajat hidup orang banyak yang sebelumnya telah beraktivitas di dalamnya. Di samping pertimbangan biofisik dan lingkungan perubahan fungsi tersebut harus melalui penilaian matang untuk menghindari timbulnya kerugian dan potensi konflik di masa mendatang. Hingga Januari 2007 telah terjadi perubahan fungsi hutan produksi menjadi kawasan hutan dengan fungsi lain seluas 884.860,36 hektar di seluruh Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan fungsi kawasan hutan produksi dan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi dengan fungsi taman nasional terhadap sosial ekonomi masyarakat seperti kondisi sosial masyarakat (pemilikan lahan, budaya dan aspek sosial lainnya), kondisi ekonomi masyarakat (mata pencaharian dan pola hidup masyarakat) Dampak lingkungan terhadap ketersediaan air dan kelestarian hutan serta dampak hukum terhadap status kepemilikan lahan dan dampak kelembagaan terhadap pengelola kawasan dan instansi terkait.

Tabel 1 (*Table 1*). Perkembangan Perubahan Kawasan Hutan Produksi di Indonesia (Tahun 2007) (*The change progress of Production Forest in 2007*)

No	Wilayah	Fungsi semula	Luas (ha)	Fungsi sekarang
1	Sumatera	HP	60.310	Taman Nasional
		HPT	141.100	Taman Nasional
2	Jawa	HP	32.534,05	TN, Tahura & HL
		HPT	32.417,31	TN & Tahura
3	Kalimantan	HP	510.250	Taman Nasional
		HPK	58.450	Taman Nasional
4	Sulawesi	HP	22.114	Taman Nasional
		HPT	338	Taman Nasional
		HPK	3.221	Taman Nasional
5	Maluku	HP	6.075	Taman Nasional
		HPT	7.650	Taman Nasional
6	Irian Jaya	HP	2.436	LNG
		HPT	1.030	LNG
		HPK	6.935	LNG

Sumber (*Source*) : Badan Planologi Departemen Kehutanan, data s/d Januari 2007. (*Planning Agency Department of Forestry Data of January 2007*)

B. Tinjauan Pustaka

Keputusan pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan di Gunung Merapi sebagai Taman Nasional menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Penolakan datang dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan masyarakat, ilmuwan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta Namun dengan sosialisasi dan kesepakatan bersama maka kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dikelola secara kolaboratif manajemen, dengan melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, BUMN, LSM dan masyarakat setempat. Model pengelolaan TNGM secara kolaboratif manajemen ini tidak saja bisa dilakukan antar pemerintah daerah yang memiliki wilayah di kawasan Gunung Merapi, tetapi bisa juga oleh pemerintah dengan LSM dan kelompok masyarakat lainnya. Pengelolaan TNGM yang dilakukan dengan mengadopsi kepentingan ekologi dan kepentingan sosial ekonomi agar bisa sejalan, diperlukan payung hukum yang jelas, yaitu melalui kesepakatan bersama antara pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah Departemen Kehutanan, Perum Perhutani, pemerintah daerah dan BUMN, pemerintah propinsi DIY, pemerintah propinsi Jateng, pemerintah kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali dan pemerintah kabupaten Klaten (Sulistyo dalam Kapan Lagi).

Sementara itu, menurut pejabat Dinas Kehutanan DIY bahwa dengan ditetapkannya kawasan Gunung Merapi menjadi TNGM, seharusnya masyarakat di sekitar gunung itu justru akan diuntungkan. Karena sebelumnya mereka yang beraktifitas di kawasan hutan di kaki Gunung Merapi dilarang, namun sekarang dengan status TNGM justru aktifitas mereka dilegalkan dan mendapatkan jaminan hukum, meskipun harus dilakukan penataan

Dengan dijadikannya TNGM, maka kawasan Gunung Merapi yang wilayahnya meliputi dua propinsi yaitu Jateng dan DIY serta empat kabupaten itu, akan dibagi dalam beberapa zona.

1. Zona Khusus meliputi wilayah puncak gunung hingga wilayah aliran magma, Zona Inti I dan Zona Inti II yang merupakan wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya plasma nutfah, dan zona ini terlarang bagi semua kegiatan masyarakat.
2. Zona rimba yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktifitas masyarakat setempat, diantaranya menanam rumput untuk pakan ternak, asalkan tidak menebang tegakan pohon hutan.
3. Zona Pariwisata yakni wilayah yang selama ini menjadi obyek wisata, atau akan dikembangkan menjadi obyek wisata
4. Zona Rehabilitasi yaitu zona yang sudah rusak oleh aktifitas pertambangan dan kegiatan ekonomi lainnya yang akan direhabilitasi. (Kapanlagi.com)

Sementara itu pengelolaan taman nasional Gunung Halimun dan Salah melalui suatu proyek penguatan kelembagaan (*Multistakeholder Project* / MP). Proyek ini diluncurkan pertama kali pada Pebruari 2004 sebagai suatu proyek kerjasama 5 tahun antara Departemen Kehutanan dan JICA dengan tujuan menguatkan pengelolaan Taman Nasional melalui kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dengan harapan hasilnya dapat digunakan pada taman nasional lainnya di Indonesia.

Proyek ini di fokuskan pada

1. Identifikasi isu penting (ancaman eksternal dan kelemahan internal) melalui lokakarya yang dilaksanakan di awal proyek dengan melibatkan penduduk setempat dan pemerintah.
2. Formulasi program terpadu yang berfokus pada upaya memperbaiki kelemahan internal tersebut
3. Manajemen kolaborasi dimana setiap *stakeholder* harus berperan dalam pengelolaan wilayah konservasi.

Beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan meliputi (i) pengembangan Rencana Pengelolaan Taman Nasional yang menampung opini para pihak, (ii) pengembangan sistem pendukung informasi (termasuk pemeliharaan *database*), (iii) monitoring & perlindungan spesies yang terancam punah melalui dukungan masyarakat setempat, (iv) aktifitas berbasis masyarakat (Model Kampung Konservasi), (v) promosi ekowisata, pendidikan lingkungan, dan (vi) peningkatan kapasitas petugas Taman Nasional dan transfer pengetahuan untuk taman nasional lainnya di Indonesia. (Anonim 2008)

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga propinsi yaitu di Sumatera Utara, Jambi dan Kalimantan Tengah. Lokasi ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa pada lokasi-lokasi tersebut telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan produksi dan hutan lindung menjadi kawasan hutan konservasi berupa taman nasional. Sumatera dan Kalimantan dipilih karena terjadi perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi Taman Nasional, yang luas perubahannya terbesar pertama dan kedua dan sebelumnya dikelola oleh pihak lain. Obyek penelitian dilakukan pada tiga taman nasional antara lain Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan Taman Nasional Sebangau (TNS)

B. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder dari instansi dan para pihak yang terkait, data primer serta sumber-sumber atau referensi dan hasil-hasil review yang mendukung kajian ini. Data-data pendukung yang dikumpulkan berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, hukum, lingkungan dan kelembagaan baik formal maupun informal. Data-data pendukung tersebut di dapatkan dari :

1. Badan Planologi (lokasi, luas dari kawasan yang mengalami perubahan fungsi)
2. Direktorat Jenderal PHKA (pengelolaan kawasan konservasi)
3. Balai TN Batang Gadis, Balai TN Bukit Duabelas dan Balai TN Sebangau.
4. Dinas Kehutanan Propinsi dari tiga lokasi TN di atas dan Dinas Kabupaten setempat
5. Masyarakat di sekitar TN (sosial, ekonomi dan kondisi lingkungan)
6. Persepsi masyarakat setelah adanya perubahan fungsi

C. Analisis data

Analisa dilakukan dengan tabulasi sederhana untuk selanjutnya pembahasan dilakukan secara *driskriptif* baik kualitatif maupun kuantitatif. Terhadap masyarakat sekitar yang menjadi sampel, dilakukan analisa dampak baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sebelum dan sesudah perubahan fungsi kawasan. Aspek sosial dilakukan dengan pendekatan keadaan sosial masyarakat seperti kepemilikan lahan, pendidikan dan budaya serta aspek sosial lainnya. Aspek ekonomi didekati dengan sumber mata pencaharian dan pola hidup responden apakah ada perubahan yang berarti setelah ada perubahan fungsi. Aspek lingkungan melalui pendekatan keberadaan sumber air untuk kehidupan sehari-hari dan kelestarian hutan. Sedangkan aspek kebijakan / aturan melalui pendekatan status kepemilikan lahan baik lahan milik maupun lahan garapan bagi masyarakat serta aturan-aturan yang mengatur tentang perubahan fungsi kawasan. Selanjutnya dilakukan kajian tentang aspek kelembagaan dengan keberadaan Balai TN

D. Kerangka Analisis

Adapun kerangka analisis yang digunakan dalam tulisan ini dapat dilihat pada Gambar 1 Langkah awal yang dilakukan adalah mengetahui kebijakan dan aturan-aturan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan. Selanjutnya mengetahui kondisi dan potensi dari kawasan-kawasan yang mengalami perubahan fungsi pada masing-masing taman nasional. Kemudian mengidentifikasi masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan TN. baik dari aspek sosial ekonomi, lingkungan dan hukum. Langkah terakhir mengetahui dampak perubahan baik dari segi ekonomi, sosial, kebijakan (aturan/ hukum) dan lingkungan bagi masyarakat sekitar terutama yang ketergantungannya sangat tinggi terhadap keberadaan kawasan hutan baik sebelum maupun sesudah perubahan.

Gambar 1 (Figure 1). Kerangka Analisis (*Analytical Framework*)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Fungsi Kawasan HP dan HL Menjadi Taman Nasional

Perubahan fungsi kawasan hutan produksi (HP) dan hutan lindung (HL) menjadi kawasan konservasi (HK) dilakukan untuk menghentikan kegiatan eksploitasi pemanfaatan hasil hutan kayu dalam upaya menjaga kelertarian keaneka ragaman hayati, perlindungan plasma nutfah dan mempertahankan aset lainnya yang ada di kawasan HP dan HL. Perubahan fungsi suatu kawasan hutan baik HP, HL maupun HK mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Dimana suatu kawasan HP banyak melibatkan manusia dalam pengelolaannya, sedangkan HL dan HK lebih bersifat perlindungan.

Penetapan kawasan HK menjadi Taman Nasional pada dasarnya adalah untuk

- Melindungi, memelihara, memperbaiki dan melestarikan kawasan hutan yang memiliki keanekaragaman flora fauna, sumber tanaman obat-obatan dan ekosistem yang tinggi dan terancam punah.
- Menjaga kelestarian sumberdaya air untuk kelangsungan sektor pertanian dan sumber air bagi kehidupan masyarakat sekitar
- Mengurangi dan mencegah kerusakan hutan akibat kegiatan eksplotasi terhadap penebangan kayu dan eksplorasi penambangan serta penebangan liar yang akan mengancam terhadap kerusakan hutan

1. Potensi dan Kondisi Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis

Pembentukan TNBG pada dasarnya merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk mengelola kawasan lindung dan hutan produksi kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang pada saat itu terkesan tidak terurus dan sangat rawan terhadap pencurian kayu atau ilegal logging dan bahkan rawan perambahan. Melalui SK Bupati No 522/982/Dishut/2003 tanggal 8 April tahun 2003 kepada Menteri Kehutanan mengusulkan kawasan HL seluas 108.500 ha dijadikan taman nasional. Dilanjutkan dengan surat Dirjen PHKA No 488/DJ-IV/KK/2003 tanggal 20 Mei tahun 2003 pada prinsipnya mendukung atas usulan perubahan fungsi kawasan tersebut dengan kelengkapan persyaratan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tim terpadu di lapangan menunjukkan bahwa kawasan yang diusulkan memiliki kondisi dan potensi sumberdaya alam yang masih baik. Terdapat keanekaragaman jenis tumbuhan (flora) dan habitat fauna langka seperti harimau, beruang, siamang, kera merah dan lainnya serta merupakan daerah tangkapan air sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar. Dengan SK Menhut No 126/Menhut-II/2004 tanggal 29 April tahun 2004 perubahan fungsi kawasan HL seluas 101.500 hektar dan kawasan HPT eks HPH seluas 6.500 ha menjadi kawasan TNBG. HL yang berubah fungsi yaitu HL Register 4 Batang Gadis I, Register 5 Batang Gadis II, Register 27 Batang Natal I, Register 28 Batang Natal II, Register 29 Batahan Hulu dan Register 30 Batang Parlampungan I. Kawasan HL tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam kurun waktu 3 tahun antara tahun 1921-1924. Tujuan dilakukan perubahan fungsi untuk menyelamatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis seluas 386.455 ha yang merupakan sumber penyedia air bagi sektor pertanian dimana sebanyak ± 300.000 jiwa menggantungkan hidupnya yang tersebar di 68 desa dari 10 kecamatan yang bermukim disekitar TNBG. Masalah sosial yang muncul setelah perubahan ini antara lain : Masyarakat masih belum paham terhadap fungsi dan manfaat kawasan TN, permasalahan tata batas dengan masyarakat yang masih tarik ulur, adanya perkebunan² di dalam kawasan TN, adanya pemukiman warga Nias ± 100 KK yang bermukim di dalam kawasan sejak 1980, janji Pemda setempat yang belum terealisasi untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan TN, adanya keinginan untuk merambah hutan dan masih menganggap adanya “hutan adat”, konsep pembangunan wilayah yang belum satu persepsi dengan instansi terkait dimana keinginan terhadap Revitalisasi Tanaman Perkebunan masih dominan. TNBG berada di Pegunungan Bukit Barisan Sumatera bagian Utara. TN ini secara administratif pemerintahan berlokasi di Kabupaten Mandailing - Natal (Madina) Propinsi Sumatera Utara yang meliputi 11 wilayah kecamatan dan bersinggungan dengan 71 desa dan satu desa diantaranya, yaitu Desa Batahan merupakan enklave di TNBG. Secara geografis terletak diantara $99^{\circ} 12' 45''$ sampai dengan $99^{\circ} 47' 10''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 27' 15''$ sampai dengan $1^{\circ} 01' 57''$ Lintang Utara dan berada dalam DAS Batang Gadis, DAS Batang Parlampungan, DAS Batang Batahan dan DAS Batang Natal. DAS Batang Gadis

Kawasan hutan lindung dan hutan produksi tersebut merupakan kawasan hutan register yang relatif masih utuh. Selain berfungsi untuk melindungi daerah bawah DAS Batang Gadis juga untuk budidaya pertanian, pemukiman dan perdagangan serta kawasan tersebut mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keaneka ragam hayati dan dapat dikembangkan melalui pemanfaatan jasa lingkungan berupa ekowisata atau pariwisata alam. Ekowisata berupa kunjungan ke kawasan alam untuk melihat dan menikmati aneka tumbuhan dan satwa liar dengan dampak negatif yang paling minimal bagi lingkungan. Potensi wisata alam yang dapat dikembangkan di dalam kawasan TNBG antara lain : Keindahan Puncak Gunung Sorik Marapi, Panorama pegunungan alam, Aliran air panas, Keindahan Danau Saba Begu Sopotinjak

Kawasan HP yang mengalami perubahan fungsi menjadi TN meliputi areal eks HPH PT. Gunung Raya Utama Timber (GRUTI) seluas ± 5.500 Ha dan PT. Aek Gadis Timber seluas ± 1.000 Ha. Perubahan fungsi HP menjadi kawasan konservasi ini pada hakekatnya memberikan kesempatan kepada hutan untuk bernafas, dengan melakukan jeda (*moratorium*) penebangan hutan alam di kawasan HP. Namun hingga saat ini areal seluas 33.721 ha dari kawasan HL masih tumpang tindih dengan perusahaan pertambangan emas dan mineral milik PT Sorikmas Mining. Dengan kondisi hutan yang lestari dan terjaga baik fungsi ekologis (pengatur iklim, penjaga kesuburan tanah, pengendali tata air), fungsi keanekaragaman hayati juga fungsi ekonominya, maka TNBG secara maksimal dapat dimanfaatkan sebagai modal alam tanpa bayar (*unchanged natural capital*) bagi serangkaian kegiatan perekonomian lokal jangka panjang, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata alam, perikanan atau peternakan. Selanjutnya kondisi zonasi TNBG dapat dilihat pada Gambar 2

Keterangan (*Remark*) : a) Sungai yang membelah TN
b) Zona yang dilindungi
c) Zona diluar patok batas difinitif

Gambar (*Figure*) 2. a. Sungai Batang Gadis (*Batang Gadis River*), b. Zona Inti (*Core Zone*) dan c. Zona Penyangga (*BufferZone*)

2. Potensi dan Kondisi Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas

Keberadaan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) berawal dari gagasan Pemerintah Daerah Kabupaten Surolangun-Bangko untuk menjadikan kawasan hutan Bukit Duabelas sebagai Hutan Lindung dan Cagar Biosfir yang berfungsi sebagai cagar budaya komunitas anak rimba. Melalui SK Menteri Kehutanan No 46/Kpts-II/1987 tanggal 12 Februari ditetapkan sebagai kawasan *Cagar Biosfer* seluas 29 485 ha. Selanjutnya pada tahun 2000 Gubernur Jambi melalui SK No. 525/0496/2000, tanggal 20 Januari 2000 kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk membatalkan pencadangan lahan PT Inhutani V dan PT Sumber Hutan Lestari seluas 38.500 ha guna perluasan kawasan Cagar Biosfer dari semula 26.800 ha menjadi 65.300 ha. Selanjutnya melalui SK Menteri Kehutanan No 258/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2003 kawasan seluas 60.500 ha ditunjuk sebagai kawasan taman nasional yang berasal dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 20.700 ha, Hutan Produksi Tetap (HPT) 11.400 ha, Areal Penggunaan Lain (APL) 1.200 ha dan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam /Cagar Biosfir (KSAPA) seluas 27.200 ha. TNBD ini meliputi 3 Kabupaten antara lain Kabupaten Batanghari (65 %), Sarolangun (15%) dan Tebo (20 %). TNBD merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis dataran rendah di Propinsi Jambi. Dimana, hutan alam yang masih ada terletak di bagian Utara taman

nasional ini, sedangkan yang lainnya merupakan hutan sekunder. Jenis tumbuhan yang ada antara lain bulian (*Eusideroxylon zwageri*), meranti (*Shorea* sp), menggeris/kempas (*Koompassia excelsa*), jelutung (*Dyera costulata*), jernang (*Daemonorops draco*), damar (*Agathis* sp), dan rotan (*Calamus* sp). Terdapat kurang lebih 120 jenis tumbuhan termasuk cendawan yang dapat dikembangkan sebagai tumbuhan obat. TN ini merupakan habitat dari satwa langka dan dilindungi seperti siamang (*Hylobates syndactylus syndactylus*), beruk (*Macaca nemestrina*), macan dahan (*Neofelis nebulosa diardi*), kancil (*Tragulus javanicus kanchil*), beruang madu (*Helarctos malayanus malayanus*), kijang (*Muntiacus muntjak montanus*), meong congkok (*Prionailurus bengalensis sumatrana*), lutra Sumatera (*Lutra sumatrana*), ajag (*Cuon alpinus sumatrensis*), kelinci Sumatera (*Nesolagus netscheri*), elang ular bido (*Spilornis cheela malayensis*), dll. Jumlah sungai dan anak sungai sangat banyak yang berasal dari dalam kawasan ini, sehingga kawasan ini merupakan daerah tangkapan air terpenting bagi Daerah Aliran Sungai Batanghari. Keadaan topografi TN ini datar sampai bergelombang sedang, dengan bukit/gunung seperti Bukit Suban, Sungai Punai (± 164 m. dpl), Gunung Panggang (± 328 m. dpl), dan Bukit Kuran (± 438 m. dpl) (BKSDA 2006)

Masyarakat asli Suku Anak Dalam (SAD/Orang Rimba) telah mendiami hutan TNBD selama puluhan tahun. SAD menyebut hutan yang ada di TNBD sebagai daerah pengembaraan; dimana mereka berinteraksi dengan alam, saling memberi, saling memelihara dan saling menghidupi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, SAD melakukan kegiatan berburu babi, mencari ikan, mencari madu, dan menyadap karet untuk dijual. Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam penunjukan hutan Bukit Duabelas menjadi TNBD dilanjutkan dengan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas (RPTNBD) telah mengancam Hak-hak Masyarakat Adat. orang rimba sebagai penduduk asli TNBD. BKSDA Jambi mengungkapkan bahwa TNBD ada untuk menjamin kelangsungan hidup Komunitas Adat Orang Rimba (KAOR), yang artinya bahwa konservasi dalam bentuk TNBD adalah pelestarian pemanfaatan, dan konservasi berbasis masyarakat (*community-based conservation*). Namun dalam implementasi berdasarkan aturan-aturan RPTNBD, ada hal yang sifatnya protektif, dan memisahkan KAOR dari kawasan konservasi (misalnya dengan menetapkan kawasan pemukiman orang rimba hanya di areal tertentu dalam TNBD). Artinya konservasi hanya sebagai perlindungan hutan semata, yang akhirnya akan berimplikasi pada model pengelolaan kawasan yang tertutup atau eksklusif (Suveltra 2007).

Salah satu syarat kawasan hutan ditetapkan menjadi taman nasional adalah bahwa kawasan hutan tersebut memiliki ekosistem yang masih utuh atau masih memiliki keadaan alam yang asli dan alami. (UU No. 5 tahun 1990 Pasal 1 huruf 14) Artinya hutan taman nasional belum pernah dimanfaatkan oleh siapapun. Hal ini sangat kontras bertentangan dengan alasan penunjukkan TNBD. dimana hampir semua Kawasan Hutan Bukit Duabelas sudah pernah dimanfaatkan oleh KAOR untuk memenuhi kehidupan mereka mulai dari berladang, berkebun (karet tradisional), berburu dan meramu. Sehingga dapat dikatakan bahwa, penunjukkan Kawasan Hutan Bukit Duabelas menjadi taman nasional tidak mengacu pada aturan yang berlaku. KAOR baru mengetahui adanya RPTNBD setelah penunjukkan. Artinya, dalam penyusunan dan pembuatan RPTNBD, sama sekali tidak melibatkan KAOR sebagai pihak yang secara langsung diatur dalam RPTNBD. Akibatnya terjadi penolakan dari KAOR terhadap RPTNBD karena pertentangan antara aturan-aturan RPTNBD dengan aturan adat Orang Rimba. RPTNBD masih menjadikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum. Padahal saat RPTNBD disahkan UU tersebut tidak berlaku lagi dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Keterangan (Remark) : a) Jalan sepanjang ± 17 km dengan kondisi berbatu b) lahan berada dalam kawasan TN (Road about 17 km to the Location)(Land in National Park Area)

Gambar 3 (Figure3). a) Menuju kawasan TNBD (Road to TNBD) b) Kebun Karet Rakyat (Community rubber Plantation)

3. Potensi dan Kondisi Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Sebangau

Penunjukan kawasan konservasi kelompok hutan sebangau diawali dengan dikeluarkannya Surat Bupati Katingan Nomor 522.51/143/Ek tanggal 6 Pebruari 2003 dan Nomor 522.51/696/EK tanggal 1 Oktober 2003; Surat Bupati Pulang Pisau Nomor 119/500/EK Januari 2003 dan ditindak lanjuti dengan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/33/IV/Bapp tanggal 20 Januari 2004. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 423/Menhut-II/2004 tanggal 10 Oktober 2004 memutuskan tentang perubahan fungsi kawasan hutan pada Kelompok Hutan Sebangau seluas ± 568.700 ha terdiri dari HP seluas ± 510.250 ha dan HPK seluas ± 58.450 ha terletak di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi taman nasional dengan nama Taman Nasional Sebangau (TNS). Kawasan konservasi kelompok hutan sebangau tersebut merupakan bagian ekosistem rawa gambut yang relatif masih utuh dengan karakteristik ekosistem yang unik ditinjau dari jenis tanah, topografi, hidrologi, flora dan fauna. Disamping itu juga kawasan tersebut memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna yang tinggi, meliputi 166 jenis flora diantaranya jenis yang dilindungi seperti Ramin (*Gonyostilus bancanus*), Jelutung (*Dyera costulata*), dan Belangeran (*Shorea belangeran*), 116 jenis burung, 35 jenis mamalia dan 36 jenis ikan diantaranya termasuk jenis dilindungi, merupakan habitat satwa Orangutan (*Pongo pygmaeus*) dengan kelimpahan populasi sebanyak ± 6.200 ekor, Bekantan (*Nasalis larvatus*), memiliki bentang alam asli, keindahan danau alami, dan atraksi kehidupan berbagai jenis burung di habitat aslinya seperti burung Bangau Tong-tong (*Leptoptilus javanicus*) Sementara itu masalah lain yang menyebabkan dikeluarkannya SK Menhut tersebut adalah maraknya terjadi penebangan liar dan perambahan yang berasal dari lingkungan sekitar dan berasal dari propinsi lain. Berdasarkan pantauan World Wide Fund for Nature (WWF) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalteng belasan ribu potongan kayu jenis meranti, jelutung, dan jinjit yang telah dikuliti terlihat memenuhi parit-parit yang keluar dari kawasan Taman Nasional (TN) Sebangau. (kompas). Forum Masyarakat TNS di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Kalteng, juga melaporkan sampai akhir 2005 pembabatan hutan terus dilakukan terhadap kayu jelutung, pantung, perupuk, dan ketiau di wilayah Mendawai dan sekitarnya.

a) Perikanan sekitar TNS

b) Nelayan di Kawasan TNS

Keterangan (Remark) : a) dan b) Merupakan sumber mata pencaharian (Income sources)

Gambar (Figure) 4 : Sungai utama di kawasan TN (The River in National Park Area)

B. Dampak Sosial dan Ekonomi Terhadap Masyarakat

1. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar TNBG

Kabupaten Madina memiliki 273 desa yang tersebar kurang merata di luasan 662.000 ha menjadi tempat tinggal penduduknya sejumlah 377.677 jiwa. Dari angka tersebut, penduduk Kabupaten Madina hidup dengan kepadatan rata-rata 55 jiwa per km². Sebagian besar potensi wilayah kabupaten belum maksimal dimanfaatkan khususnya di wilayah Pantai Barat Kabupaten Madina. Lebih dari 80% penduduk Kabupaten Madina menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama di 71 desa yang berada di sekitar kawasan TNBG menggantungkan hidup dari hutan sekitarnya. Kabupaten Madina adalah salah satu dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara yang memiliki penduduk relatif miskin terbesar. Persentase penduduk pra sejahtera di Kabupaten Madina adalah 60,4 % meskipun penduduk usia produktifnya cukup tinggi, atau sebesar 20,6 persen dari jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten tersebut. (Dishut) 2004.

Ketergantungan pada sektor pertanian terlihat dari seluruh nilai PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) kabupaten sebesar 574,65 milyar sebanyak 35% disumbangkan dari sektor pertanian. Kelangsungan sektor ini sangat tergantung dari kelangsungan jasa lingkungan yang diberikan oleh kawasan TNBG (pengendali siklus air, kesuburan, dsb). Sektor industri di Madina masih didominasi industri kecil dan menengah, seperti industri makanan dan kerajinan. Sektor ini belum mampu memberi nilai tambah pada komoditas pertanian, karena sekitar 79 % masyarakat di Kabupaten Madina adalah petani. Mereka lebih banyak menggantungkan hidup dari hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Sekitar 17% penduduk Madina hidup dari perkebunan terutama karet dan 62 % dari pertanian tanaman pangan. Sektor pertambangan juga merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar kawasan TNBG, dimana lokasi penambangan berada di Kabupaten Panyabungan yang dilakukan baik orang dewasa maupun anak-anak. Kegiatan ini merupakan pertambangan liar atau pertambangan emas tanpa izin (peti) Anak-anak mencari emas disaat libur sekolah dan hanya sebagai sampingan. Penambangan emas dilakukan dengan menggali lubang sedalam 4 meter dan diameter sampai 5 meter. Mereka menggunakan peralatan modern berupa mesin penyedot air dari sungai ke lubang galian. Kemudian dari lubang tersebut disedot dan dibuang ke atas sebuah penampang kayu yang dasarnya dialasi dengan karpet, di karpet itulah emasnya tersangkut. dan emas baru diambil. pada sore hari Kemudian penambang tersebut menumpuk kembali batu-batu berukuran besar menjadi benteng-

benteng penahan tanah di dalam lubang galian tersebut, sehingga untuk runtuh kemungkinannya sangat kecil sekali terjadi. Mereka mendapatkan emas minimal sebanyak 8 gram dan terkadang bisa sampai 30 gram setiap harinya. Penambang liar ini sebenarnya telah berlangsung berpuluh tahun lamanya. bahkan sejak zaman Belanda. Penambang liar bisa ditemui di dua sungai, yakni sungai Batang Gadis dan sungai Muara Sipongi, dengan luas sekitar mencapai 100 ha. Pemerintah daerah sulit untuk menghentikan kegiatan penambangan ini karena sudah merupakan sumber penghidupan mereka. bahkan tidak jarang terjadi konflik pada saat penambang liar ini ingin mendapatkan ijin. Diharapkan melalui pembentukan Taman Nasional Batang Gadis para penambang liar dapat ditata dengan baik dan kelestarian hutan dapat dijaga.

Aspek sosial yang dirasakan terjadi adalah adanya perubahan seperti hasil pengamatan lapangan pada dua desa di kawasan TNBG yang menggambarkan bahwa (1) *Desa Sopotinjak Kecamatan Batang Natal* terletak di daerah zona penyangga TNBG, dengan luas 1200 ha. Jumlah penduduk sebanyak 284 jiwa (54 KK) dengan mata pencaharian penduduk lebih dari 90 % merupakan petani. Hasil sawah berupa padi dan sayur-sayuran, sedangkan hasil kebun berupa kayu manis, aren dan kopi. Pada umumnya masyarakat Sopotinjak memperoleh lahan dari warisan dan membuka hutan desa. Rata-rata kepemilikan lahan seluas 1 ha. Pembukaan hutan desa ini diperbolehkan untuk warga asli asal tidak untuk diperjual belikan. Umumnya kepemilikan tanah oleh masyarakat ini tidak disertifikatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, rata-rata responden mengetahui keberadaan TNBG. Informasi ini diperoleh dari Dinas Kehutanan Madina pada saat sosialisasi pembentukan TNBG. Pada dasarnya masyarakat menyetujui pembentukan taman nasional ini, dengan syarat kebun mereka tidak masuk dalam areal taman nasional. Harapan masyarakat dengan adanya TNBG adalah dapat meningkatkan pendapatan dan mendapat bantuan modal. Setelah terjadi perubahan kawasan dari hutan lindung menjadi taman nasional, masyarakat belum merasakan adanya perubahan dalam kehidupan mereka. Kemungkinan karena pada awalnya hutan di sekitar mereka hutan lindung, yang juga tidak boleh dimanfaatkan. Beberapa orang menyatakan bahwa dengan berubahnya fungsi hutan ini mereka tidak bisa lagi berburu binatang dan mengambil rotan di hutan. Disamping itu, hutan di sekitar wilayah Desa Sopotinjak, terutama hutan lindung aman dari pencurian kayu dan perambahan hutan. Rata-rata masyarakat sudah menyadari pentingnya fungsi hutan dalam mengatasi longsor karena wilayah mereka memiliki lereng yang tajam. Bahkan untuk hutan desa yang bisa dimanfaatkan jika lerengnya terlalu tajam tidak boleh digarap. (2) *Desa Hutabargot Setia* merupakan pemekaran dari Desa Hutabargot Dolok pada tahun 2002. Sampai tahun 2007, belum diketahui secara pasti luas desa ini. Desa ini berbatasan secara langsung dengan TNBG, akan tetapi batas antara desa dengan TNBG belum jelas. Masih ada konflik tata batas antara masyarakat dengan TNBG. Tata batas sementara sudah ada, tetapi masyarakat desa belum setuju karena berada di kawasan kebun mereka. Jumlah penduduk desa Hutabargot Setia sekitar 465 jiwa, dengan 106 KK. Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah bertani dan berkebun. Dengan produk utama berupa padi, karet dan kopi. Rata-rata kepemilikan kebun 0.5 ha per KK. Kebun ini pada awalnya berasal dari hutan desa. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan sebagian besar mengetahui keberadaan TNBG dari tetangga termasuk kepala desa. Hanya sebagian kecil saja yang mengetahui langsung dari Pemda, terutama Dishut pada saat sosialisasi pembentukan TNBG. Pada awalnya masyarakat menyetujui adanya Taman Nasional karena ketakutan adanya perambahan hutan oleh masyarakat desa lain di luar 5 desa terdekat dari TNBG. Tetapi pada tahap selanjutnya mereka tidak setuju karena kebun mereka masuk ke dalam kawasan TNBG.

Harapan masyarakat agar tata batas TNBG berada di luar kebun masyarakat, agar masih ada kesempatan untuk anak cucu mereka membuka hutan untuk berkebun.

Setelah terjadi perubahan kawasan dari hutan lindung menjadi taman nasional, masyarakat belum merasakan adanya perubahan dalam kehidupan mereka. Kemungkinan karena pada awalnya hutan di sekitar mereka hutan lindung, yang juga tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan dari sisi penegakan hukum sudah ada perubahan, sebelum ada TNBG, jika ada perambahan di hutan lindung tidak ada tindakan dari pemerintah, sekarang jika ada perambahan ada tindakan dari polisi. Permasalahannya dari pihak polisi meminta tata batas secara *de facto*, sedangkan yang ada tata batas sementara yang belum disepakati masyarakat, sehingga tidak ada tindak lanjutnya.

2. Dampak Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat *Enclave* TNBG

Di dalam kawasan TNBG terdapat areal *enclave* Batahan yang berada di sebelah selatan kawasan yang berdekatan dengan Desa Pagar Gunung. Desa Batahan sudah ada sejak tahun 1918. Daerah *enclave* juga merupakan tanah adat, saat survei dilakukan oleh tim inisiator merupakan tegakan hutan sekunder-primer, yang terdapat rencana untuk lahan budidaya coklat dan kopi jenis lokal oleh masyarakat Batahan. Lokasi *enclave* ini belum dilakukan pemanfaatan karena letaknya yang jauh dari pemukiman masyarakat desa (± 6 jam berjalan kaki), memiliki potensi tegakan meranti dan bania yang bernilai ekonomi tinggi. Di kawasan *enclave* ini juga merupakan habitat bagi burung bayan, burung enggang (4 macam: ekor panjang, paruh hitam, bercula), kijang, rusa, babi hutan dan lain sebagainya. Meskipun Desa Batahan dengan luas ± 425 Ha, merupakan desa yang dapat dikategorikan terisolir, ternyata memiliki penduduk yang cukup banyak karena terdapat 87 KK dengan jumlah penduduk 375 jiwa. Masyarakat di Desa Batahan sepenuhnya menggantungkan hidup dari bercocok tanam, dengan rata-rata kepemilikan lahan pertanian penduduk ± 10 ha/KK. Masyarakat desa melakukan budidaya tanaman keras, seperti kayu manis (dominan), kopi (dulu, karena harga jatuh maka diganti dengan kayu manis), nilam yang tumpang sari dengan kayu manis, sawo, durian, mangga, juga ternak ikan mas. Sistem perladangan penduduk adalah berpindah-pindah karena tidak mampu membeli pupuk kimia. Penduduk desa juga memproduksi Gula Aren yang asli tanpa campuran sehingga kualitasnya lebih baik dari desa lainnya. Kegiatan yang sering dilakukan adalah perburuan tradisional masyarakat untuk mendapatkan daging, mencari hasil hutan lainnya seperti rotan dll.

Fasilitas sekolah yang terdapat di Desa Batahan adalah sebuah SD dengan Guru PNS 2 orang dan 2 orang tenaga pengajar honor. Fasilitas kesehatan sebelumnya terdapat Bidan Desa namun sejak tahun 1997, tenaga medis tersebut meninggalkan desa tanpa ada penggantinya. Untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, masyarakat pergi ke Ulu Pungkut atau dengan penyembuhan sendiri dengan cara tradisional atau dengan bantuan obat-obatan yang dapat dibeli bebas di pasaran. Penduduk desa menganut agama Islam, dengan fasilitas peribadatan 1 buah mesjid dan didukung dengan 2 buah mushola.

Masyarakat setempat menunggu realisasi TNBG dalam hal penataan batas karena dikhawatirkan oleh mereka dengan adanya batas kawasan akan terjadi pengurangan hak-hak mereka, terutama yang dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak masyarakat dalam aktivitasnya di dalam hutan, sehingga manfaat langsung yang dapat mereka ambil akan berkurang, seperti halnya hasil hutan non kayu dan perburuan tradisional.

3. Dampak Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat Sekitar TNBD

Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) merupakan masyarakat tradisional yang berpindah-pindah di sekitar kawasan dan sebagian turun ke jalan lintas Sumatera (1980) untuk meminta sesuatu dari setiap kendaraan yang lewat. Dari kebiasaan tersebut pihak pemerintah propinsi mengusulkan kepada Dephut untuk menetapkan Bukit Duabelas sebagai kawasan perlindungan khusus SAD yang kemudian berkembang menjadi TN. Berdasarkan hasil inventarisasi pihak LSM Warsi tahun 2004 terdapat 1.524 orang masyarakat SAD berada di sekitar dan di dalam kawasan TNBD. Secara keseluruhan ada 2 kecamatan dan 18 desa (12 desa di Kec Pauh dan 6 desa di Kec Air Hitam) dan jumlah penduduk sebanyak 20.643 orang yang berada di sekitar TNBD.

Kondisi masyarakat sekitar atau di dalam kawasan hutan sebelum adanya perubahan fungsi pada umumnya bertani tradisional seperti ubi kayu, padi dan berburu satwa liar, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang masih sangat rendah. Pola hidup cenderung konsumtif dan pemukiman masyarakat hanya bentuk gubuk dan semi permanent dengan akses jalan yang masih minim. Jumlah anggota keluarga rata-rata 5 orang. Masyarakat bermukim di sekitar / di dalam kawasan hutan pada umumnya sejak adanya pembukaan hutan oleh HPH dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat terhadap pemukimannya. Keberadaan Suku Anak Dalam (SAD) merupakan ciri khusus yang membedakan TNBD dengan taman nasional lainnya di Indonesia. SAD menggantungkan hidup sepenuhnya baik ekonomi, sosial dan budaya dari kawasan hutan yang ada disekitarnya. Hutan bukan hanya merupakan sumber penghidupan berladang, berburu dan memanen hasil hutan tetapi juga berkaitan erat dengan budaya tradisi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam pengelolaan TNBD ini perlu perlindungan atas SDA yang diyakini memiliki nilai sakral yang terkait dengan ritual adat. Sebaran SAD ada 4 kelompok yang tersebar di beberapa lokasi sekitar kawasan TNBD yang berjumlah 1524 jiwa.

Kebutuhan pangan masyarakat SAD dipenuhi dari memanen jenis umbi-umbian, buah-buahan serta umbut-umbutan dan berburu satwa liar. Pemanenan mengikuti aturan adat yang berwawasan lingkungan antara lain: Untuk *pemanenan umbi-umbian dan umbut-umbutan berlaku aturan “ambil satu bayar satu”* untuk buah-buahan *“pohon induk dilarang ditebang”*. Sedangkan untuk tujuan komersil SAD memungut rotan, getah-getahan dan karet, penjualannya dilakukan melalui perantara atau *jernang*. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan sebagian masyarakat SAD yang sudah bersosialisasi dengan lingkungan di luar kawasannya berindikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berkonotasi negatif misalnya terjadi penjualan lahan kepada tokoh desa setempat atau keterlibatan dalam pencurian kayu.

Menurut BKSDA Jambi beberapa alasan masyarakat SAD menolak keberadaan TNBD

- a. Terbatasnya akses masyarakat SAD dengan adanya zonasi, karena pola hidup yang berpindah-pindah
- b. Terbatasnya pemanfaatan SDA baik flora maupun fauna karena mereka umumnya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan papan dari kawasan hutan
- c. Kebun karet yang dimiliki terancam punah

Oleh karena itu pihak pemerintah pusat dalam hal ini BKSDA sudah melakukan sosialisasi tentang keberadaan TNBD. Hasil sosialisasi menunjukkan hal yang positif dan dicapai kesepakatan antara lain bahwa

- a. Orang Rimba mengakui keberadaan TNBD yang harus dilindungi
- b. Orang Rimba mengakui sistem zonasi dan pihak pengelola TNBD tidak akan memusnahkan kebun/tanaman milik SAD yang sudah ada sebelumnya.

- c. Jika ada lahan mereka yang masuk kedalam zona inti akan dikeluarkan
- d. Orang rimba berjanji tidak akan melakukan penjualan lahan maupun pembalokan.

Pada umumnya warga desa yang dahulunya bekerja di HPH sudah memilki kebun sawit pada saat HPH tersebut gulung tikar. Dengan sawit penghasilan per bulan bisa mencapai 3 ton atau 3 juta rupiah dengan harga Rp 1400/kg. Warga trans yang pada awalnya berjumlah 300 kk saat ini telah berkembang menjadi 800 kk. Selama ini tidak ada tindakan hukum bagi pembeli tanah di lokasi dalam kawasan hutan

4. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar TNS

Pada mulanya mayoritas masyarakat di sekitar kawasan Sebangau hidup dari mengambil kayu (illegal logging), menarik kayu dan bekerja di sawmill. Dengan perkembangan kondisi hutan semakin berkurang dan banyak sawmill yang tutup, membuat masyarakat mulai beralih ke sektor lainnya seperti usaha pertanian tanaman pangan, usaha perikanan, usaha perkebunan, kegiatan mengambil kulit Gemor, usaha dagang, usaha kerajinan dan usaha jasa lainnya. Dari kegiatan ini akan terbentuk jejaring usaha atau pola-pola hubungan/interaksi baik secara individu maupun lembaga yang terkait dengan keberadaan kegiatan berbagai usaha-usaha masyarakat. Jejaring ini tidak terbatas pada jejaring ekonomi saja, melainkan juga jejaring sosial yang terjalin di dalamnya.

Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mayoritas masalah pemasaran hasil usaha. Seperti harga rotan yang tidak stabil, harga ikan yang sering jatuh pada saat musim ramai hasil ikan. Kendala lainnya menyangkut pengolahan pasca panen dan teknis lainnya. Pemilikan lahan untuk pertanian di beberapa Kecamatan di sekitar TNS cukup luas jika dibandingkan dengan pemilikan lahan untuk pertanian di Pulau Jawa. Untuk kecamatan Mendawai rata-rata 2-4 ha, di Kecamatan Kamipang dan Tasik Payawan 1-2 ha. Luas lahan ini umumnya diperoleh dengan cara membuka hutan dan tanah warisan. Profil Usaha Masyarakat di Sekitar Taman Nasional Sebangau

a. Usaha Pertanian Tanaman Pangan

Lahan pertanian yang digarap petani merupakan sawah tadah hujan sehingga rawan banjir dan tanaman terendam air. Produktivitas padi yang dapat dihasilkan berkisar antara 10 - 30 kuintal gabah kering per hektar. Lahan biasanya juga ditanami tanaman palawija dan sayuran disekitar bedengan. seperti : jagung, singkong, kacang panjang, terong, lombok dan kedelai.

b. Usaha Perikanan

Usaha perikanan masyarakat disekitar TNS yaitu usaha perikanan air tawar. Kegiatan ini dilakukan secara turun-temurun, bahkan kegiatan ini awalnya merupakan mata pencaharian utama penduduk. Kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun, Jika musim hujan, ikan lebih banyak di sungai, pada musim kemarau ikan lebih banyak di danau. Jenis ikan yang ditangkap cukup beragam, seperti tauman, pipih, baung, gabus dan lele

c. Usaha Perkebunan

Masyarakat di sekitar sungai Katingan dan Sebangau, umumnya memiliki kebun yang ditanami antara lain rotan, karet dan tanaman buah-buahan. Kebun rotan banyak ditemukan di Mendawai. Kamipang dan Tasik Payawan. Jenis rotan yang dibudidayakan adalah rotan taman/rotan sigi (*Calamus caesius*) dan rotan irit/danum (*Calamus trachycolens*). Kebun rotan yang dikelola penduduk sebagian besar warisan, sehingga umur kebun ada yang mencapai 40 tahun lebih Kebun karet rakyat disekitar TNS tumbuh di lahan-lahan bekas berladang. Sedangkan kebun buah-buahan banyak dijumpai di sekitar pekarangan seperti kelapa, jeruk, nenas, pisang, jambu, cempedak dll. Hasil dari kebun ini sebagian besar untuk konsumsi

sendiri dan jarang dijual karena terbatas pasarnya. Disamping itu kegiatan mengambil kulit gemor oleh sebagian masyarakat merupakan pekerjaan tambahan, meskipun sudah mulai sedikit. Dampak sosial ekonomi perubahan fungsi hutan di kawasan sebangau terhadap masyarakat hanya berpengaruh kepada mereka yang melakukan kegiatan penebangan liar, sedangkan bagi masyarakat yang mata pencahariannya di sektor lain tidak berpengaruh karena lahannya tidak masuk dalam kawasan taman nasional.

5. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Perubahan

Dari beberapa aspek sosial dan ekonomi yang ditemukan di lapangan seperti yang terurai di atas menunjukkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan produksi dan hutan lindung menjadi hutan konservasi dengan fungsi taman nasional relatif tidak berpengaruh nyata terhadap kondisi sosial masyarakat terutama bagi yang melakukan kegiatan penebangan liar karena kawasan HP yang mengalami perubahan adalah merupakan areal HPH yang sudah tidak aktif. Dampak sosial yang dirasakan dengan perubahan fungsi hutan adalah terjadinya perambahan dan klaim lahan karena pada saat dilakukan tata batas lahan garapan mereka masuk dalam areal kawasan TN sehingga masyarakat tidak bisa berladang dan memanfaatkan hasil hutan lagi di kawasan konservasi tersebut. Dan harapan masyarakat sekitar dengan adanya perubahan fungsi ini keberadaannya diakui dan adanya peningkatan kesempatan berusaha. Belakangan ini karena pengaruh dari masyarakat luar beberapa kelompok masyarakat SAD sudah mulai menanam budidaya karet dan sawit di lahan eks HPH yang sampai saat ini belum dikelola setelah ditetapkan sebagai TN. Harapan masyarakat terhadap perubahan ekonomi dimasa datang yaitu adanya peningkatan produksi dari hasil budidaya non kehutanan (karet dan sawit) melalui ekstensifikasi selain itu adanya roda perekonomian di desa dan kecamatan semakin berkembang yang saat ini menurun sebagai dampak dari operasi pemberantasan illegal logging dan penutupan industri perakyuan

Tabel 2 (Table2). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Perubahan (*Social,Economi of Society Impact Before and After Change*)

No	TN (<i>National Park</i>)	Sosial (<i>Social</i>)		Ekonomi (<i>Economi</i>)	
		Sebelum (<i>Before</i>)	Sesudah (<i>After</i>)	Sebelum (<i>Before</i>)	Sesudah (<i>After</i>)
1	TN BG	a) berladang, kebun, sawah b) perambah tdk ditindak c) berburu. tambang d) sumber air tidak sulit	e) Sebagian lahan masuk areal tata batas b) Ada tindakan c) dilarang d) sumber air tidak sulit	Penghasilan bersumber dari semua usaha	Penghasilan hanya dari sawah
2	TN BD	a) berladang ber pindah, kebun membalok b) berburu	Berkebun dan merambah,	Penghasilan bersumber dari semua usaha	Penghasilan hanya dari kebun
3	TNS	a) berladang, sawah berkebun, b) perikanan	a) berladang sawah b) b) perikanan	Penghasilan bersumber dari semua usaha	Penghasilan hanya dari berladang dan perikanan

Proses perubahan belum final dan masih perlu dilakukan (a) sosialisasi kembali secara intensif terutama kepada masyarakat khususnya mengenai aturan2 tentang konservasi. (b) Peningkatan tupoksi khususnya penyuluh dalam hal sosialisai tentang keberadaan TN. (C) Masyarakat dapat memanfaatkan batas sementara untuk melanjutkan melakukan kegiatan di lahannya terutama lahan perkebunan dan apabila batasnya sudah difinitif maka lahannya dapat dikeluarkan dari kawasan TN Masyarakat yang bermukim disekitar kawasan TN

umumnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat mereka hanya mengklaim sebagai hak ulayat/ tanah adat. Harapan masyarakat kedepannya masih dapat beraktifitas di kawasan TN terutama pada zona pemanfaatan untuk berkebun.

C. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Institusi

Perubahan fungsi suatu kawasan hutan menjadi fungsi lainnya akan berpengaruh terhadap kelembagaan pengelolaannya. Konsekwensi dari kebijakan departemen kehutanan dengan penunjukkan kawasan HP dan HL menjadi kawasan konservasi dengan fungsi taman nasional terhadap organisasi pengelolaannya dikeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.29/Menhut-II/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang pembentukan Balai Taman Nasional (BTN) antara lain BTNBN di Sumatera Utara, BTNBD di Jambi dan BTNS di Kalimantan Tengah. Keberadaan balai-balai ini akan berdampak terhadap kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM), Struktur Organisasi, Asset (Kantor dan barang investasi lainnya) serta kesiapan pendanaan. Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa institusi yang baru dibentuk ini masih membutuhkan waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM, Pendanaan dan lokasi dan bangunan untuk perkantoran terutama bagi seksi-seksi yang mempunyai wilayah kawasan. Disamping itu juga sosialisasi tentang keberadaan TN belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat terutama yang berada di dalam maupun sekitar kawasan. Koordinasi dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan keberadaan kawasan masih perlu dilakukan secara intensif. Program-program yang akan direncanakan hendaknya berkaitan dengan sektor lainnya seperti sektor pariwisata dan pemerintah setempat.

Kawasan hutan produksi yang mengalami perubahan fungsi pada umumnya HPH / IUPHHK yang tidak aktif atau dicabut sehingga dari segi ekonomi terutama pemanfaatan kayunya (meranti dan rimba campuran) relatif lebih kecil karena potensinya tidak ekonomis lagi. Dari segi SDM adanya PHK oleh perusahaan yang berpengaruh terhadap pendapatan buruhnya. Sedangkan persepsi dari para pemegang HPH terhadap perubahan sebagian kawasannya adalah adanya ketidak jelasan dalam berusaha dan ketidakjelasan pertanggung jawabannya terhadap kewajiban yang telah dibebankannya. Dari perkembangan penerimaan iuran PSDH/DR bagi instansi kehutanan sebelum dan sesudah perubahan fungsi adalah fluktuatif karena produksi berdasarkan target sehingga semakin lama secara signifikan turun. Demikian pula halnya dengan PAD dari retribusi dan PBB yang diterima oleh instansi non kehutanan dari perusahaan relative turun.

Dampak lainnya yaitu terhadap lembaga yang mengelola kawasan sebelum diambil alih oleh Balai TN seperti di Sumatera Utara masih terjadi konflik dengan perusahaan pertambangan dimana sebagian areal berada pada kawasan TN. Juga terhadap Dinas Kehutanan Kabupaten dimana dengan perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi TN mengurangi produksi kayu yang dihasilkan oleh PT Gruti dan PT Aek Gadis Timber yang ijin usahanya dicabut. Sampai dengan tahun 2000 kedua perusahaan masih menghasilkan kayu sebesar 155.410,02 m³. Alokasi DAK DR menurun pada tahun 2001 sebesar Rp 9 843 684 000, tahun 2002 Rp 2 761 647 000 dan pada tahun 2003 Rp 866 417 000.

D. Dampak Lingkungan

Di Sumatera Utara para penambang liar di Kabupaten Mandailing Natal, sesungguhnya hanya memanfaatkan sedikit kawasan di sepanjang bibir Sungai Batang Gadis

yang masuk dalam kawasan TNBG. Namun demikian sebuah penambangan, sekalipun dalam kapasitas yang sangat kecil, tetap memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Terlihat di sepanjang Sungai Batang Gadis banyak warisan bekas galian yang tak ditutupi kembali oleh para pekerja yang sebelumnya menggali areal di bibir sungai hingga berdiameter 10 meter dengan kedalaman sampai 10 meter. Sekarang tetap masih menganga dengan ditutupi air sehingga menciptakan lubang dalam. Menurut Ismayadi Samsuudin dalam anonim bahwa kawasan yang direncanakan sebagai taman nasional termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis. Sejauh ini, belum ada larangan terhadap warga untuk menghentikan pertambangan liar tersebut, meski kawasan galian berada di sepanjang Sungai Batang Gadis yang masih termasuk daerah kawasan TNBG.

Dampak lain terhadap aspek lingkungan yaitu intensitas kerusakan terhadap kawasan TN kecil khususnya pencurian kayu dan perambahan hutan sehingga mengurangi ancaman terhadap banjir dan erosi, masyarakat Madina masih kuat terhadap tradisi/adat istiadat dengan adanya hutan *rarayan* dan *lubuk larangan* yang tidak boleh mencemari sungai dan anak sungai di setiap DAS/Sub DAS Terhadap masyarakat terjaminnya kegiatan mereka dalam bidang pertanian, perikanan karena SDA yang terjaga

Di Jambi kondisi hutan di kawasan TNBD berupa hutan primer yang sudah terganggu dan hutan sekunder. Pada beberapa bagian areal kawasan karena kegiatan eksploitasi yang berlebihan mengakibatkan tumbuhnya semak belukar seperti areal hutan ex Cagar Biosfer dimana sebagian besar areal sepanjang batas luar kawasan sudah terambah oleh masyarakat desa sekitar dan dijadikan perkebunan karet dan sawit rakyat. Selain itu areal ex PT Inhutani dan PT SHL terdapat areal perkebunan karet masyarakat yang dikembangkan sebelum adanya TNBD dan di areal Sub DAS kondisi lingkungannya relatif telah tereksploitasi berat khususnya di sepanjang jalur logging ex konsesi HPH. Disamping itu kegiatan penebangan liar/pembalokan khususnya di wilayah Kabupaten Batang hari diduga berlangsung intens bahkan melibatkan masyarakat desa dan orang rimba karena akses menuju kawasan tersebut terbuka. (BTNBD 2007)

Meski telah ditetapkan sebagai kawasan taman nasional sejak Oktober 2004, penebangan liar di hutan TNS, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, terus berlangsung, ratusan ribu potong kayu jenis meranti (*Shorea* spp), jelutong (*Dyera* spp), dan jinjit hasil penebangan liar ditemukan mengapung di sungai dan rawa-rawa dalam kawasan konservasi itu. Menurut Kompas (23 Juni 2006) jumlah kayu tebangan liar itu diperkirakan mencapai 300.000 batang dengan panjang rata-rata sekitar 4 m dan diameter 30 cm. Temuan ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan operasi-operasi sebelumnya. Batang-batang kayu yang telah dikuliti berderet di tepian Sungai Bulan dan Bantat, yang memanjang lebih dari 40 km di dalam kawasan TNS. Ketua Forum Masyarakat TNS mengatakan, penebangan liar berdampak buruk bagi lingkungan dan membahayakan masyarakat yang tinggal di tepian Katingan.

Secara yuridis penentuan perubahan status hutan produksi sebangau jadi TN seharusnya merupakan kewenangan propinsi, mengingat areal hutan Sebangau seluas 500.000 Ha berada di lintas Kabupaten/Kota yaitu Katingan, Palangka Raya, dan Pulang Pisau, sehingga penetapan hutan Sebangau menjadi TN perlu di tinjau kembali zona. yang sebaiknya untuk konservasi serta untuk kebutuhan lahan pembangunan seperti pertanian, perkebunan, dan sarana prasarana termasuk infrastruktur jalan guna membuka keterisolasian daerah terutama bagi penduduk yang telah bertahun-tahun bermukim di kawasan tersebut (Mawardi)

E. Dampak Kelembagaan dan Hukum

1. Dampak Kelembagaan

Kebijakan pemerintah melakukan perubahan fungsi beberapa kawasan hutan produksi dan hutan lindung menjadi kawasan konservasi dengan fungsi taman nasional mengharuskan pihak Departemen Kehutanan membentuk instansi baru yang akan mengelola kawasan tersebut. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2006 dibentuk beberapa Balai Taman Nasional antara lain BTNBD di Jambi, BTNBG di Sumatera Utara dan BTNS di Kalimantan Tengah. Balai-balai tersebut bertugas melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan taman nasional dalam rangka konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pengelola kawasan dalam mewujudkan kawasan pelestarian alam dikembangkan melalui sistem zonasi antara lain

- a. Zona Inti berfungsi untuk pelestarian sumberdaya alam hayati, penelitian dan pendidikan
- b. Zona pemanfaatan berfungsi untuk mengakomodasikan pemanfaatan areal kawasan taman nasional seperti pariwisata alam, budidaya biota flora dan fauna
- c. Zona penyangga berfungsi untuk menjaga keberadaan, keutuhan dan keamanan zona-zona taman nasional
- d. Zona lainnya berfungsi sebagai zona pemanfaatan tradisional, rehabilitasi, zona rimba

2. Dampak Hukum

Dalam UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pasal 29 menyatakan bahwa taman nasional merupakan salah satu bentuk dari kawasan pelestarian alam. Salah satu konsekuensi atas penunjukan wilayah hutan menjadi taman nasional adalah wilayah taman nasional tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh siapapun kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 yang menyatakan bahwa di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam.

Kemudian ketentuan tersebut diatur lebih lanjut tentang perincian pembatasan aktivitas manusia di kawasan taman nasional sebagaimana tertuang dalam UU No 5 Tahun 1990 Pasal 33 ayat yang menyatakan bahwa (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. seperti mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Penjelasan dari Pasal 32 UU No. 5 tahun 1990 ini menyebutkan : “Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan taman nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan pusat rekreasi dan kunjungan wisata”. Dengan bermukimnya komunitas adat orang rimba di dalam kawasan TNBD sebenarnya sudah melanggar UU tersebut, namun hal ini hendaknya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) dimana hendaknya masyarakat SAD diikuti sertakan, karena keberadaan TN ini berdampak terhadap mata pencaharian mereka. Selama ini SAD bermukim di dalam kawasan TN berada pada zona inti. Hal yang perlu dilakukan dalam menyelamatkan kawasan eks Cagar Biosfer adalah bagaimana menempatkan komunitas

orang rimba agar tidak mengganggu keberadaan TN karena kebiasaan SAD berpindah-pindah dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sebagai langkah yang dapat dilakukan oleh pengelola TN adalah menempatkan komunitas tersebut dengan membangun rumah-rumah permanen dan memberdayakan mereka dengan memberi peluang untuk mengelola lahan yang berada diluar kawasan.

Beberapa ketentuan hukum yang bertentangan dengan keberadaan TN

- a. RPTNBD tidak menjadikan UUD 45 sebagai landasan hukum
- b. RPTNBD masih mengacu kepada Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, seperti UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang sudah diganti dengan UU No. 19 Tahun 2004.
- c. RPTNBD masih menjadikan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum yang diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dampak hukum yang terjadi di Sumatera Utara dengan keberadaan TNBG adalah tumpang tindih dengan kawasan eksplorasi pertambangan PT Sorikmas Mining (SM). Penunjukkan TNBG dilakukan pada saat izin prinsip penggunaan kawasan hutan oleh PT SM melalui surat Dephut No 804/A/VIII/1998 sudah habis masa berlakunya. Larangan kegiatan eksplorasi pertambangan emas diperkuat dengan SK Menhut No S.25/Menhut-VII/2005 bahwa lokasi kontrak karya PT SM seluas ± 33.721 ha tidak dapat digunakan lagi. PT SM sesuai dengan surat Presiden RI No B.53/Pres/I/1998 mendapat persetujuan kontrak karya pertambangan lahan galian emas dan mineral pengikutnya seluas ± 201.700 ha di Kabupaten Madina. Namun melalui Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No 755.K/20.10/DJP/2000 luas areal berkurang menjadi ± 66.200 ha. Luas areal inilah yang menjadi konflik berkepanjangan hingga saat ini dimana sebagian areal pertambangan tersebut (33721ha) termasuk dalam kawasan TNBG. Sedangkan sisanya seluas ± 32.479 ha berada diluar TNBG. Melalui surat No 016/SM/III/2005 pimpinan perusahaan menyampaikan keberatan atas SK Menhut No 126/Menhut-II/2004 dan surat Menhut No S.25/Menhut-VII/2005 dengan substansi antara lain :

- a. Dengan diberlakukannya UU No 19 thn 2004 dan Keppres No 41 tahun 2004 yang merupakan payung politik pemerintah untuk kontrak karya pertambangan di Hutan Lindung yang diberikan sebelum UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
- b. Kepmenhut No SK 126/Menhut-II/2004 tentang TNBG otomatis tidak berlaku.

Berdasarkan SK Menhut No 43/Menhut-II/2006 diputuskan untuk membentuk Tim kerja yang terdiri dari instansi-instansi terkait dalam rangka penyelesaian masalah tumpang tindih kawasan tersebut dan menyusun justifikasi baik apabila eksplorasi dilanjutkan atau dihentikan.

Dari beberapa aspek yang telah dibahas sebelumnya secara keseluruhan dapat dirangkum dalam suatu tabel 3 berikut

Tabel 3 (*Table 3*). Dampak Sosial Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Sebelum dan Sesudah Perubahan (*Social, Econom, Law and Environment Impacts Before and After Change*)

No	Aspek (<i>Aspct</i>)	Sebelum (<i>Before</i>)	Sesudah (<i>After</i>)
1	Sosial (<i>Social</i>)	Rata-rata pemilikan lahan /garapan di dlm dan sekitar kawasan HL, HP s/d 5 ha	Rata-rata pemilikan lahan /garapan di dlm dan sekitar kawasan HL, HP s/d 2,5 ha
2	Ekonomi (<i>Economi</i>)	Rata-rata penghasilan petani pemilik/penggarap Rp 1 juta – Rp 4 jut /ha	Rata-rata penghasilan petani pemilik/penggarap Rp 1 juta – Rp 4 jut /ha
3	Hukum (<i>Law</i>)	Dapat melakukan kegiatan berladang, berkebun, berladang berpindah di dalam kawasan	Tidak dpt melakukan kegiatan berladang, berkebun, berladang berpindah di dalam kawasan
4	Lingkungan (<i>Environment</i>)	Rawan penebangan liar dan pencurian kayu dan pertambangan liar	Bisa diatasi dan diselesaikan setiap kasus yang terjadi

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

1. Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan HP tidak berpengaruh secara langsung karena hanya sebagian kecil masyarakat yang bekerja pada HPH yang saat itu masih aktif.
2. Dampak sosial ekonomi masyarakat terhadap perubahan fungsi kawasan hutan antar lain adanya perambahan dan klaim lahan garapan, tidak dapat berburu, tidak bisa berladang, tidak dapat memanfaatkan hasil hutan lagi, larangan penambangan liar di kawasan yang ditunjuk sebagai TN hal ini terjadi pada saat dilakukan tata batas karena lahan mereka berada di dalam kawasan TN.
3. Dampak positif terhadap aspek lingkungan antara lain, sebagian intensitas kerusakan terhadap kawasan TN kecil khususnya pencurian kayu sehingga mengurangi ancaman terhadap banjir dan erosi. Sedangkan dampak negatif yang masih terjadi antara lain penambang liar masih mengancam terhadap kelestarian kawasan konservasi. dan areal hutan ex Cagar Biosfer sudah menjadi perkebunan karet dan sawit rakyat.
4. Masyarakat yang bermukim dan berladang di dalam kawasan TN umumnya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat mereka hanya mengklaim sebagai hak ulayat/ tanah adat. Sehingga dengan perubahan fungsi kawasan areal pemukiman masuk ke dalam tata batas Harapan masyarakat kedepannya masih dapat beraktifitas di sekitar kawasan TN terutama pada zona lainnya yaitu pemanfaatan tradisional/ rehabilitasi.
5. Dampak ekonomi bagi instansi terkait yang berada di daerah terutama dinas kehutanan dimana dengan perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi TN akan mengurangi produksi kayu yang sebelumnya diproduksi oleh para pengusaha HPH. Sedangkan penerimaan iuran PSDH/DR fluktuatif karena produksi berdasarkan target sehingga semakin lama secara signifikan menurun.
6. Proses perubahan belum final dan masih perlu dilakukan sosialisasi kembali secara intensif terutama kepada masyarakat khususnya mengenai aturan2 tentang konservasi. Saat ini masyarakat masih memanfaatkan tata batas sementara untuk menggarap lahan perkebunan dan apabila batasnya sudah difinitif maka lahannya diharapkan dapat dikeluarkan dari kawasan TN

7. Koordinasi dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan keberadaan kawasan masih perlu dilakukan secara intensif. Program-program yang akan direncanakan hendaknya berkaitan dengan sektor lainnya seperti pariwisata dan pemerintah setempat
8. Kolaborasi pengelolaan kawasan taman nasional merupakan salah satu langkah awal koordinasi yang dilakukan menuju kearah pengelolaan yang lebih efektif, efisien, optimal, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Untuk itu perlu landasan hukum tersendiri berupa Keputusan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kolaborasi pengelolaan TN.

PUSTAKA

- Anonim. 2007 Hutan Taman Nasional Sebangau Dijarah www.kompas.com/kompas-cetak/0512/17/daerah/2296211.htm Load tgl 27 Des 2007
- Anonim. 2007 Kawasan Taman Nasional Sebangau Terancam Penebangan Liar Lingkungan www.kompas.com/kompas-cetak/0606/23/daerah/2758426.htm Load tgl 27 Des 2007
- Anonim. 2007 Pembalakan Liar Kembali Terjadi di Taman Nasional Sebangau, www.tempointeraktif.com/hg/nusa/kalimantan/2007
- Anonim. 2008 Proyek Penguatan Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam. 2006, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi TNBD dan manfaatnya kepada masyarakat sekitar TNBD Jambi
- Balai Konservasi Dan Sumber Daya Alam, Subdit pemolaan dan pengembangan BKSDA. Resume dan Kronologis TNBG
- Balai Konservasi Sumber Daya Alam. 2006, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penentuan Batas Pengakuan Partisipatif. Jambi
- Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. 2007 Buku Informasi. Mengenal Taman Nasional Bukit Duabelas Balai TNBD Jambi
- Benno Suveltra. 2007. Taman Nasional versus Komunitas Adat Orang Rimba Di kawasan Hutan Bukit Duabelas Jambi.
- Budhi*, 2007 *Surat Cinta dari Bukit Duabelas*. www2.kompas.com/kompas-cetak/0701/22/sumbagsel Load 1 Februari 2008.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal 2004. Pembangunan Taman Nasional Batang Gadis Sebagai Inisiatif Daerah Untuk Melestarikan Sumber Daya Alam Hutan di Kabupaten Mandailing Natal Dinas Kehutanan Kabupaten Madina
- Dinas Kehutanan Propinsi Sumut, Dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal, BKSDA Sumut II, CII, Yayasan Batang Gadia, Konsorsium BITRA 2006. Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Taman Nasional Batang Gadis, Naskah Akademik, Panyabungan

- Feri Irawan, Pengingkaran Hak Adat Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas
Direktur Eksekutif WALHI Jambi <http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/hutan280906>
- Kapan Lagi. 2007. Taman Nasional Gunung Merapi akan dikelola Kolaboratif Manajemen
Kapan Lagi.com : load tgl 18 Maret 2008
- Kompas. 2006. Kawasan Taman Nasional Sebangau Terancam Penebangan Liar.
Lingkungan. 23 Juni 2006. Load 27 Desember 2007
- Mawardi 2007 Perlu Pengkajian Mendalam Sebelum Tetapkan Zona Konservasi TINJAU
Pencanangan Taman Nasional Sebangau yahoo.com/group/lingkungan/ message
/24668
- Sihombing L dkk. Pemusnahan Keanekaragaman Hayati di TNBG dan Konsekuensi
Hukumnya. Dalam Rangka Penyelesaian Tumpang Tindih WKP PT Soritmas Mining
Kertas Kerja Kajian Kebijakan. Conservation International Indonesia Medan Tidak
Dipublikasikan